

## **ABSTRAK**

### **AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 PK/Pdt/2016)**

Tesis ini mengkaji akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan terhadap harta bersama (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 PK/Pdt/2016). Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan adalah perjanjian perkawinan tersebut tetap sah bagi para pihak yang membuatnya dalam hal ini suami dan istri, sepanjang perjanjian perkawinan tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, namun perjanjian perkawinan tidak dapat mengikat pihak ketiga yang terkait. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan adalah tetap mengikat bagi para pihak yang membuatnya, dalam hal ini suami dan istri. Perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan tidak dapat mengikat pihak ketiga. Dimana pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan adalah untuk memenuhi asas publisitas. Sehingga pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur atau parameter keabsahan perjanjian perkawinan.

**Kata Kunci : Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Pegawai Pencatat Perkawinan.**

## ABSTRACT

THE LEGAL DUE TO MARRIAGE AGREEMENT THAT IS NOT LEGALIZED BY  
EMPLOYEES OF MARRIAGE TOWARDS COLLECTIVE ASSETS (Study of  
Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 598 PK/Pdt/2016)

This thesis examines the legal consequences of marriage agreements that are not ratified by marriage registrar employees on joint assets (case study of the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 598 PK / Pdt / 2016). This thesis uses a normative juridical research method. The results show that the validity of a marriage agreement that is not ratified by a marriage registrar is that the marriage agreement remains valid for the parties who make it, in this case husband and wife, as long as the marriage agreement has met the legal requirements of an agreement stipulated in Article 1320 of the Civil Code, however The marriage agreement cannot bind the related third party. In addition, the research results also show that the legal position of a marriage agreement that is not ratified by a marriage registrar is still binding on the parties who make it, in this case the husband and wife. A marriage agreement that is not ratified by a marriage registrar cannot bind a third party. Where the ratification of the marriage agreement by a marriage registrar is to fulfill the principle of publicity. So that the ratification of the marriage agreement by a marriage registrar cannot be used as a benchmark or parameter of the validity of the marriage agreement.

Keywords: Marriage, Marriage Agreement, Registration Officer Marriage.